

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang   : a. bahwa dalam rangka melindungi dan memenuhi hak anak sebagai generasi penerus yang potensial agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang sistematis, terstruktur, terarah, terukur, dan tepat sasaran dengan menggunakan strategi implementasi, pemberdayaan dan pendayagunaan potensi yang ada;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023 sudah tidak sesuai dan perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan pembangunan daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2025-2029;
- Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
2. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta

5. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi dan memenuhi hak anak;
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
  - a. menjamin terpenuhinya hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
  - b. menjamin pelaksanaan;
  - c. menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, ramah, dan bersahabat;
  - d. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
  - e. memberikan fasilitasi untuk mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
  - f. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak;
  - g. menyediakan sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
  - h. meningkatkan implementasi KLA; dan
  - i. meningkatkan komitmen Perangkat Daerah untuk berperan aktif dalam mewujudkan KLA.

BAB II  
KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan minimal terdiri dari:
  - a. ketua: sekretaris daerah;
  - b. wakil ketua: kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian;
  - c. sekretaris: kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
    1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
    2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
    3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
    4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
    6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
    7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan kelurahan.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
  - b. mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
  - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada wali kota secara berkala.

- (4) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB III

#### PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK

##### Pasal 4

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian dan Gugus Tugas KLA.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
  - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
  - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
  - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
  - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

##### Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup RAD KLA mencakup:
  - a. kelembagaan; dan
  - b. klaster.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
  - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. klaster Perlindungan Khusus Anak.
- (3) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.

- (4) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f minimal memuat:
- a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
  - b. rencana aksi;
  - c. ukuran;
  - d. satuan;
  - e. data dasar;
  - f. target;
  - g. alokasi pendanaan; dan
  - h. instansi penanggung jawab
- (5) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB 4

#### PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu

##### Pelaporan

##### Pasal 6

Gugus Tugas KLA menyampaikan laporan pencapaian KLA kepada Wali Kota.

##### Bagian Kedua

##### Pemantauan dan Evaluasi

##### Pasal 7

- (1) Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

#### BAB V

#### PENDANAAN

##### Pasal 8

Pendanaan terhadap pelaksanaan RAD KLA dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. Sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Yogyakarta tahun 2020-2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR ...

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR           TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK  
ANAK TAHUN 2025-2029

**RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

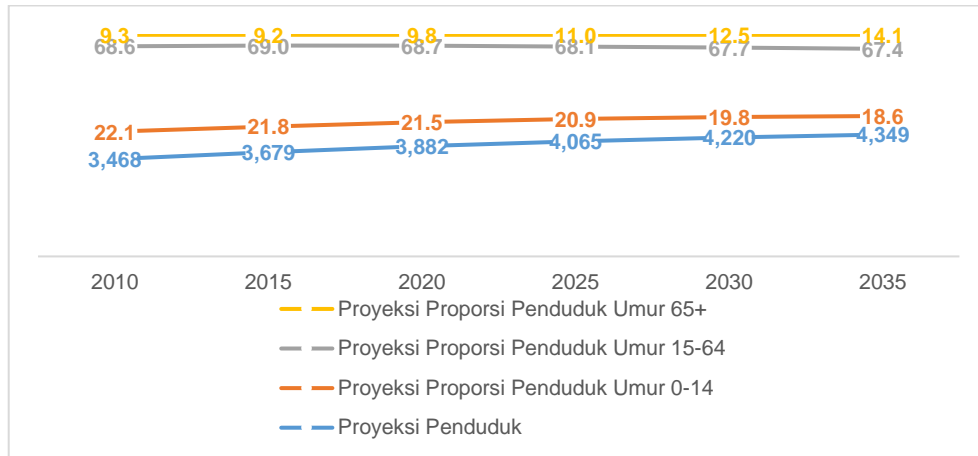
**A. Latar Belakang**

Hasil proyeksi penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 238,5 juta pada Tahun 2010 menjadi 305,6 juta pada Tahun 2035. Walaupun demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2010-2035 menunjukkan kecenderungan terus menurun. Dalam periode 2010-2015 dan 2030-2035 laju pertumbuhan penduduk turun dari 1,38 persen menjadi 0,62 persen per tahun. Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian. Tingkat penurunan karena kelahiran lebih cepat daripada tingkat penurunan karena kematian. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*) turun dari sekitar 21,0 per 1000 penduduk pada awal proyeksi menjadi 14,0 per 1000 penduduk pada akhir periode proyeksi, sedangkan Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate/CDR*) naik dari 6,4 per 1000 penduduk menjadi 8,8 per 1000 penduduk dalam kurun waktu yang sama.

Asumsi tentang penurunan tingkat kelahiran dan kematian Indonesia sangat mempengaruhi susunan umur penduduk. Proporsi anak-anak berumur 0-14 tahun turun dari 28,6 persen pada tahun 2010 menjadi 21,5 persen pada tahun 2035. Dalam kurun waktu yang sama, mereka yang dalam usia kerja, 15-64 tahun meningkat dari 66,5 persen menjadi 67,9 persen dan mereka yang berusia 65 tahun ke atas naik dari 5,0 persen menjadi 10,6 persen. Perubahan jumlah tersebut juga diproyeksikan terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Susunan umur penduduk di DIY termasuk sedikit lebih tua dari provinsi lainnya, artinya proporsi penduduk yang berusia lanjut, 65 tahun ke atas, lebih tinggi (14,0 persen). Jadi jumlah penduduk 65 tahun ke atas di DIY telah mencapai lebih dari 10 persen, pada tahun 2035 sudah dapat dikategorikan sebagai provinsi



penduduk tua (*aging population*). Sebaliknya, persentase penduduk 0-14 tahun pada kurun waktu yang sama di DIY termasuk terendah di Indonesia (18,6 persen). Usia kerja, 15-64 tahun juga mengalami penurunan dari 68,6 persen menjadi 67,4 persen. (Gambar.1)



Keterangan: Proyeksi Penduduk (Ribuan)

Gambar 1. Proyeksi dan Proporsi Penduduk DIY Tahun 2010-2035

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2013.

Berdasarkan data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Kota Yogyakarta Tahun 2023 jumlah penduduk Kota Yogyakarta usia anak (0-18 tahun) adalah 107.461 jiwa atau 25,91 persen dari seluruh total penduduk Kota Yogyakarta yang berjumlah 414.705 jiwa. Jumlah usia anak tersebut terdiri dari 52.466 anak perempuan dan 54.995 anak laki-laki. Rasio Jenis Kelamin (RJK) kelompok usia 0-18 tahun sebesar 104,82 artinya dari setiap 100 penduduk anak perempuan, terdapat sekitar 105 penduduk anak laki-laki. Menurut usia tunggal, penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan pada semua kategori usia anak.

Ketentuan tentang hak anak telah menjadi bagian dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*)<sup>1</sup> merupakan hasil dari Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dituangkan dalam Resolusi PBB 44/25 tanggal 20 November 1989<sup>2</sup>, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. KHA terdiri atas 54 pasal yang materinya mengatur mengenai hak anak dan mekanisme implementasi hak anak<sup>3</sup>. Sudah 33 tahun Pemerintah

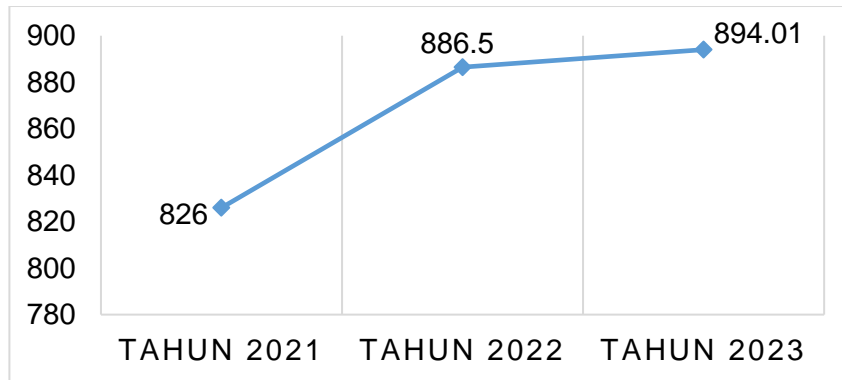
<sup>1,3</sup> Darmi, Rosmi. 2016. (*Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against the Law*. Jakarta: Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 16, Nomer 4, Desember 2016. Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016.

<sup>2</sup> UNICEF. 1989. *Convention on the Rights of the Child*. New York City: UNICEF.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) terhitung sejak Tahun 1990. Konvensi Hak Anak (KHA) diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan seluruh anak Indonesia. Sebagai dasar pelaksanaan KHA, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai negara yang telah meratifikasi KHA, Pemerintah Indonesia telah mensosialisasikan KHA kepada semua pihak sampai kepada anak secara holistik dan berkesinambungan. Salah satu upaya besar yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah membentuk Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Alur perwujudan Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak diawali dengan inisiasi mandiri sebagai Kota Layak Anak pada Tahun 2009. Sejak Tahun 2014 terjalin komitmen para pemangku kepentingan dan tersusun Perda Nomor 1 Tahun 2016 sehingga Kota Yogyakarta mendapat KLA Tingkat Madya Tahun 2014, 2016, dan 2017. Perbaikan kinerja pemenuhan hak dan perlindungan anak terus ditingkatkan pemerintah Kota Yogyakarta yang diikuti dengan penghargaan meningkat menjadi Kota Layak Anak Tingkat Nindya pada Tahun 2018 dan 2019. Penegasan komitmen lintas sektor dalam RAD KLA Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023 serta penyusunan *Grand Design* KLA Kota Yogyakarta Tahun 2022-2030 turut mendukung pencapaian KLA Kota Yogyakarta menjadi Tingkat Utama pada Tahun 2021-2023. Dalam upaya mempercepat perwujudan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Yogyakarta aktif mendorong untuk mewujudkan Kemantren layak anak, Kelurahan layak anak hingga kampung ramah anak.

Mencermati hasil Verifikasi Lapangan Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Tanggal 16 Juni Tahun 2023 terlihat bahwa hasil verifikasi lapangan berjumlah 894,01 poin dari nilai maksimal 1000 poin yang berarti terdapat *gap* sebesar 105,99 poin. Namun demikian, nilai tersebut mengalami peningkatan 7,51 poin dibanding Tahun 2022 dan Tahun 2021. Rekap penilaian tersebut dapat dicermati pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Hasil Penilaian KLA Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta Berdasarkan Hasil Penilaian KLA KPPA Tahun 2021-2023.

Hasil penilaian tersebut menunjukkan Kota Yogyakarta masih harus terus meningkatkan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan anak hingga mencapai KLA Paripurna. Mencermati Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023 Telah berakhir, maka Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Yogyakarta sebagai Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak berinisiatif untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. RAD tersebut diharapkan menjadi acuan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta bersama pemangku kepentingan terkait dalam bersinergi untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak Paripurna sesuai target Indonesia Layak Anak (IDOLA) yang sejalan dengan program PBB yaitu *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau TPB pada tahun 2030.

## B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah:

1. Mengakomodir komitmen pemangku kepentingan dalam menjalankan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Yogyakarta sesuai dengan amanah Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)
2. Meningkatkan peran aktif dari *stakeholder* (Gugus Tugas KLA) melalui program dan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD pengampu gugus tugas KLA).
3. Memberikan kerangka acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam pelaksanaan setiap tahapan peningkatan capaian Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

4. Memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, melalui internalisasi muatan RAD KLA Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ke dalam RPJMD, Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di Kota Yogyakarta

Sasaran yang akan dicapai melalui Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah:

1. Mengidentifikasi isu strategis terkait anak di Kota Yogyakarta berdasarkan klaster kota layak anak.
2. Tersusunnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjalankan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Yogyakarta sesuai dengan amanah Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)
3. Tersusunnya program dan kegiatan *stakeholder* (Gugus Tugas KLA) untuk menyelesaikan isu anak di Kota Yogyakarta melalui program dan kegiatan yang responsif anak di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu Gugus Tugas KLA) Tahun 2025-2029
4. Tersusunnya RAD Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Menuju Paripurna Tahun 2025-2029 sebagai bahan masukan dalam RPJMD, Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di Kota Yogyakarta.

## **C. Ruang Lingkup**

### **1. Ruang Lingkup Geografis**

Ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran dari Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah wilayah Kota Yogyakarta, yang terdiri dari terdiri dari 14 Kemantren, 45 kelurahan, 616 Rukun Warga (RW) dan 2.532 Rukun Tetangga (RT).

### **2. Ruang Lingkup Subtansi**

Ruang lingkup substansi dari Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 merupakan hasil dari proses dan kegiatan kolaboratif berbagai pemangku kepentingan di tingkat Kota Yogyakarta, yang dituangkan ke dalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Rencana Aksi, Ukuran, Target Pencapaian dan Anggaran Pendanaan Rencana Aksi Daerah Kota Yogyakarta Menjadi Kota Layak Anak Paripurna.

#### **D.Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c
2. Undang-Undang Nomor 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019
3. Undang-Undang Nomor 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pasal-pasal kunci dari Undang-Undang tersebut yang menjadi dasar dalam pengembangan KLA meliputi beberapa pasal, yaitu: Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 72 Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
8. Instruksi Presiden Nomor 01/2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional
9. Instruksi Presiden Nomor 05/2014 tentang Gerakan Nasional “Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA).
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kota Layak Anak

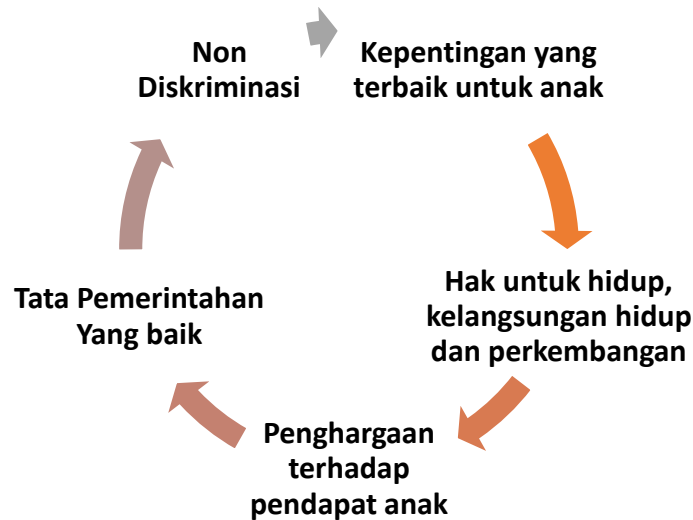
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kota Layak Anak
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/1990 Ratifikasi Konvensi Hak Anak
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 1)

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA**

#### **A. Prinsip**

Prinsip Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 di dasarkan pada 5 prinsip sebagai berikut:



Gambar 3. Prinsip Kota Layak Anak Kota Yogyakarta

Sumber: *Grand Design Kota Layak Anak (KLA) Kota Yogyakarta Tahun 2022-2030*

#### **B. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan dan target pencapaian indikator pada setiap tahapan pemerintahan RAD KLA Kota Yogyakarta sejalan dengan Grand Design Kota Layak Anak (KLA) Kota Yogyakarta Tahun 2022-2030 yang telah ditentukan, kemudian dijabarkan ke dalam kerangka pencapaian yang dilaksanakan pada masing-masing wilayah administrasi di tingkat RW atau kampung, kelurahan, dan kemantren mulai Tahun 2022 hingga Tahun 2030 hingga mencapai Kota Yogyakarta Layak Anak Paripurna. Arah kebijakan dan Kerangka pencapaian Kota Yogyakarta mencapai Kota Layak Anak Paripurna dapat dilihat pada Tabel berikut.





<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Target Tahunan</b>								
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Pembentukan Satgas PPA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pembentukan PATBM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pembentukan Puspaga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pembentukan Mitra Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pembentukan Forum SPPA Terpadu	100%								
Inisiasi Pembentukan LPAS		100%							
Pembentukan LPAS			100%						
Pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) -Sekber PAUD-HI -Sekber Informasi Layak Anak -Sekber Puskesmas Ramah Anak		100%							









<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Target Tahunan</b>								
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Monev dan Koordinasi Jejaring Perlindungan Anak Tingkat Kelurahan	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Target Pencapaian</b>	<b>KLA Utama</b>	<b>KLA Utama</b>	<b>KLA Paripurna</b>	<b>KLA Paripurna</b>	<b>KLA Paripurna</b>	<b>KLA Paripurna</b>	<b>KLA Paripurna</b>	<b>KLA Paripurna</b>	<b>KLA Paripurna</b>

Sumber: *Grand Design* Kota Layak Anak (KLA) Kota Yogyakarta Tahun 2022-2030

### **C. Prinsip Strategi**

Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan strategi dan kebijakan Kota Layak Anak dengan beberapa langkah integrasi sebagai berikut:

1. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
2. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
3. Setiap tingkatan wilayah: Kota Yogyakarta, Kemantren Kelurahan, dan RW atau Kampung.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan KLA Kota Yogyakarta antara lain sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA).  
Yaitu upaya mengintegrasikan pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak dalam penyusunan, kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.
2. Penguatan kelembagaan.  
Yaitu upaya untuk memperkuat kelembagaan Organisasi Pemerintah Daerah, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, dan Perguruan Tinggi di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi, anggaran, sarana prasarana, metoda dan teknologi.
3. Perluasan jangkauan.  
Yaitu membangun wilayah percontohan di tingkat kemantren, kelurahan, dan RW/kampung serta kawasan layak anak di sentra pertumbuhan ekonomi kemudian mereplikasikan ke wilayah lainnya.
4. Membangun jaringan.  
Yaitu membangun kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga-lembaga yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun KLA.
5. Pelembagaan dan pembudayaan KLA.  
Yaitu upaya melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah dan responsif terhadap anak dari lingkungan keluarga, keluarga besar (nucleous dan etened families), lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat untuk menjamin adanya interaksi antar generasi agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur.

6. Mengembangkan Inovasi

Yaitu dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak senantiasa berusaha menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik secara terus menerus dan berkelanjutan, selalu mengembangkan cara baru yang lebih baik, terbuka terhadap pengalaman dan pengetahuan baru, kreatif dan fleksibel, berani mengambil risiko, selalu manuangkan imajinasi dan gagasan-gagasan alternatif.

7. Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (PKIE).

Yaitu upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebarluasan informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA. Media tersebut diklasifikasikan ke dalam media dalam ruang, luar ruang, cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial termasuk system smart city Kota Yogyakarta

8. Sertifikasi dan apresiasi

Yaitu upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas pengembangan kompetensi SDM di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak serta prestasi dalam mengembagkan KLA di tingkat wilayah ke dalam kelompok yaitu pratama, madya, nindya, utama dan KLA.



### **BAB III**

## **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **A. Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan RAD KLA diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan agar mencapai hasil yang lebih baik. Pemantauan dapat dilakukan melalui Pelaporan hasil Pemantauan, pertemuan, dan/atau kunjungan lapangan.

Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian indikator target yang telah ditetapkan dalam RAD KLA. Evaluasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sama dan juga memungkinkan menggunakan pihak eksternal.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun oleh Gugus Tugas KLA. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

#### **B. Pelaporan**

Laporan pencapaian KLA disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pencapaian KLA disampaikan kepada Wali Kota oleh Gugus Tugas KLA.

#### **C. Waktu Pelaksanaan**

Dokumen RAD KLA Kota Yogyakarta ini dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) di Kota Yogyakarta.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan RAD KLA Kota Yogyakarta 2025-2029 didasarkan oleh data-data eksisting proses dan pelaksanaan pncapaian Kota Yogyakarta Layak Anak Paripusrna serta masukan lintas sektor terkait baik di tingkat wilayah hingga daerah. Penyajian dilakukan secara ringkat, jelas dan mudah dipahami.

Dokumen RAD KLA Kota Yogyakarta ini dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 5 (lima) tahun ke depan di Kota Yogyakarta. Harapannya penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Yogyakarta bisa lebih terarah dan berkelanjutan. Lebih lanjut, dokumen RAD KLA Kota Yogyakarta 2025-2029 juga perlu dilakukan pemnatauan dan evaluasi setiap 1 tahun sekali. Pemantauan pelaksanaan dapat dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kota Yogyakarta untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Yogyakarta secara berkala serta sesuai dengan rencana mencapai Kota Yogyakarta Layak Anak Paripurna

### Matriks Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
<b>I</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>														
<b>1</b>	<b>Peraturan Daerah tentang KLA</b>														
	4.01.02.2.02.00 03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati/ wali kota, keputusan bupati/ wali kota, instruksi bupati/ wali kota, surat edaran bupati/ wali kota	Peraturan/ kebijakan	2	2	2	2	2	2	300.000.000	Bagian Kesra Setda
	2.08.06.2.01.00 01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati/ wali kota, keputusan bupati/ wali kota, instruksi bupati/ wali kota, surat edaran bupati/ wali kota	Kebijakan	4	2	1	1	1	1	5.175.000	DP3AP2KB
	5.01.03.2.01.00 08	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati/ wali kota, keputusan bupati/ wali kota, instruksi bupati/ wali kota, surat edaran bupati/ wali kota	Regulasi	-	-	-	-	-	1	6.322.872	Bappeda
	1.06.04.2.01.00 12	REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penegms di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati/ wali kota, keputusan bupati/ wali kota, instruksi bupati/ wali kota, surat edaran bupati/ wali kota	Peraturan/ kebijakan	-	1	-	-	-	-	16.370.000	Dinsosnakertrans
	1.01.02.2.01.00 36	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati/ wali kota, keputusan bupati/ wali kota, instruksi bupati/ wali kota, surat edaran bupati/ wali kota	Peraturan/ kebijakan	8	4	4	4	4	4	490.993.941.218	Dindikpora
	1.05.02.2.01.00 15	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati/ wali kota, keputusan bupati/ wali kota, instruksi bupati/ wali kota, surat edaran bupati/ wali kota	Peraturan/ kebijakan	1	-	-	-	-	-	0	Satpol PP
	2.15.02.2.08.00 04	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati/ wali kota, keputusan bupati/ wali kota, instruksi bupati/ wali kota, surat edaran bupati/ wali kota	Peraturan/ kebijakan	1	-	-	-	-	-	0	Dishub

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
	4.01.02.2.01.00 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati/ wali kota, keputusan bupati/ wali kota, instruksi bupati/ wali kota, surat edaran bupati/ wali kota	Peraturan/ kebijakan	2	2	1	1	1	1	0	Bagian Tapem Setda
	-	-	-	-	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati/ wali kota, keputusan bupati/ wali kota, instruksi bupati/ wali kota, surat edaran bupati/ wali kota	Peraturan/ kebijakan	4	-	-	-	-	-	0	Dinkes
<b>2</b>	<b>Penguatan Kelembagaan KLA</b>														
	2.08.06.2.01.00 02	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator, kelembagaan, dan kluster Gugus Tugas KLA	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	48.750.000	DP3AP2KB
	5.01.03.2.01.00 08	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Penyusunan RAD KLA	RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	1	6.322.872	Bappeda
	2.08.06.2.01.00 01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembaruan Profil KLA	Profil KLA yang diperbarui secara berkala	Dokumen	1	1	1	1	1	1	250.000.000	DP3AP2KB
	2.08.06.2.01.00 01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA	Jumlah kegiatan Penguatan Kemantren Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak Tingkat Kota	kegiatan	2	2	2	2	2	2	56.600.000	DP3AP2KB
	2.08.06.2.01.00 01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Jenis	5	5	5	5	5	5	50.000.000	DP3AP2KB
	1.01.02.2.01.00 36	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah tayangan terkait Grebek Sinau	Tayangan	5	5	5	5	5	5	71.500.000	Dindikpora

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
	1.01.02.2.02.0038	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pengkoordinasian Satgas TPPK, Penguatan Waka Kesiswaan/TPPK Satuan Pendidikan	Jumlah kegiatan pengkoordinasian, penguatan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	50.000.000	Dindikpora
	8.01.02.2.01.0006	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Fasilitasi dalam pelaksanaan program parenting kebangsaan	Jumlah media pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Media	5	5	5	5	5	5	89.737.500,00	Bakesbangpol
	8.01.02.2.01.0006	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Pembentukan dan Penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Fasilitasi dalam program parenting kebangsaan	Presentase pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Kelurahan	8	8	8	8	8	8	728.137.500,00	Bakesbangpol
	2.15.02.2.08.0004	PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Jenis	1	1	1	1	1	1	0	Dishub
	2.12.02.2.03.0005	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket	3	3	3	3	3	3	51.310.000	Dindikcapil
	2.12.03.2.01.0001	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket	3	3	3	3	3	3	74.000.000	Dindikcapil
	1.02.02.2.02.0018	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Media	3	3	3	3	3	3	172.980.000	Dinkes
	2.22.08.5.07.0007	PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Media materi KIE Budaya	Media	1	1	1	1	1	1	0	Disbud

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
	2.23.02.2.01.00 01	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket	6	6	6	6	6	6	0	DPK
	3.26.05.2.01.00 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Jogja Kreatif Kotabaru Ceria	Media materi KIE KLA	Media	1	1	1	1	1	1	308.250.000	Dinpar
	2.11.04.2.01.00 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/ KOTA (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penyusunan dan Publikasi materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Jumlah media KIE terkait RTHP/RBRA	Media	1	1	1	1	1	1	15.000.000	DLH
	2.11.04.2.01.00 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/ KOTA (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya perangkat multi media di masing-masing RTHP yang terbangun	Jumlah perangkat multi media di masing-masing RTHP/RBRA	Media	-	2	2	3	3	3	500.000.000	DLH
	2.11.04.2.01.00 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/ KOTA (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penyusunan dan Publikasi materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Jumlah media KIE terkait RTHP/RBRA	Media	-	1	1	1	1	1	0	DLH
	2.08.06.2.01.00 02	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan indikator KLA	Jumlah kegiatan penguatan Gugus Tugas KLA	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	123.400.000	DP3AP2KB
	2.08.03.2.03.02	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi perlindungan dan pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	Kelurahan	2	2	2	2	2	2	51.000.000	DP3AP2KB
	2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual Anak melalui media online	Jumlah kegiatan pelatihan bagi lembaga PATBM	Kegiatan	3	5	5	5	5	5	63.750.000	DP3AP2KB
<b>3</b>	<b>Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak</b>														
	2.08.06.2.01.00 01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Pembentukan Asosiasi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang aktif dalam APSAI	Asosiasi	17	17	17	17	17	17	37.000.000	DP3AP2KB

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
			Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/ Kota										
	2.08.02.2.01.0004	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi forum lembaga profesi	Jumlah lembaga profesi yang mendapat penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PUHA	Lembaga	17	18	18	5	18	18	119.384.500	DP3AP2KB
	5.04.02.2.01.0003	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Aparatur	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang Dan Urusan Pemerintahan Umum	Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi forum lembaga profesi	Jumlah kegiatan penguatan PUHA bagi ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	Kegiatan	1	-	1	-	1	-	70.000.000	BKPSDM
	6.01.02.2.01.0001	PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi forum lembaga profesi	Jumlah pelaksanaan review PUG	Laporan	1	1	1	1	1	1	0	Inspektorat
	2.08.02.2.03.0002	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan peran PKK melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK (penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat)	Jumlah kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yang diimplementasikan menjadi program Kelurahan Layak Anak	Kegiatan	14	14	14	14	14	14	11.700.000	DP3AP2KB
	2.08.06.2.01.0001	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	Penguatan pelembagaan PUHA bagi media	Jumlah kegiatan penguatan pelembagaan PUHA bagi organisasi media	lembaga	2	2	2	2	2	2	7.400.000	DP3AP2KB

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
			Kewenangan Kabupaten/Kota	Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											
	2.08.06.2.01.00 01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan pelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan	Jumlah kegiatan penguatan pelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan	lembaga	35	35	35	35	35	35	16.750.000	DP3AP2KB
	2.08.03.2.01.00 01	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan pelembagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah kegiatan penguatan pelembagaan PUHA bagi perguruan tinggi dan Lembaga Non Pemerintah	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	7.400.000	DP3AP2KB
	2.08.07.2.01.00 05	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kabputen / kota	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Jumlah kegiatan Hotel Ramah Anak (HRA)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	16.000.000	DP3AP2KB/ KPAID
	2.08.07.2.01.00 05	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kabputen / kota	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Jumlah pelatihan KHA SDM HRA	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	16.000.000	DP3AP2KB/ KPAID
	1.06.04.2.01	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	Pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Jumlah lembaga pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Lembaga	1	1	1	1	1	1	0	Dinsosnakertrans
<b>II</b>	<b>KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b>														
<b>4</b>	<b>Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran</b>														
	2.12.03.2.01.00 02	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	%	89,00	99,15	99,20	99,20	99,20	99,20	475.300.000	Dindikcapil
	2.12.02.2.01.00 04	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase Kepemilikan Dokumen KIA	%	84,67	85,00	85,30	85,30	85,30	85,30	14.950.000	Dindikcapil
	2.12.02.2.01.00 04	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Pemula	Jumlah sekolah yang terlayani Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Pemula	Sekolah	15	15	15	15	15	15	8.625.000	Dindikcapil
	2.12.03.2.02.00 08	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak	Jumlah kemantren yang tersosialisasikan kebijakan Pemenuhan Hak Anak untuk	Kemantren	14	5	5	5	4	5	765.225.000	Dindikcapil



No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
					sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	memperoleh akta kelahiran secara gratis									
<b>5</b>	<b>Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)</b>														
					Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab	Persentase konten internet bermuatan negatif yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	Diskominfo
	2.08.06.2.01.001	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyebaran informasi layak Anak	Jumlah konten informasi layak Anak yang tersebar melalui forum Anak	Konten	2	2	2	2	2	2	0	DP3AP2KB
	2.16.03.2.02.009	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Penyebaran informasi layak Anak	Jumlah informasi Layak Anak melalui media above the line dan through the line	Media	5	5	5	5	5	5	145.000.000	Diskominfo
	2.16.03.2.02.009	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Penyebaran informasi layak Anak	Jumlah informasi Layak Anak melalui media above the line dan through the line	Media	3	3	3	3	3	3	210.000.000	Diskominfo
	2.08.06.2.01.001	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyebaran informasi layak Anak	Jumlah informasi Layak Anak melalui media above the line dan through the line	Media	5	5	5	5	5	5	33.750.000	DP3AP2KB
	1.01.02.2.01.0036	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Penyebaran informasi layak Anak	Jumlah informasi Layak Anak melalui media above the line dan through the line	Media	1	1	1	1	1	1	8.550.000	Dindikpora
	2.23.02.2.01.0001	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Penyebaran informasi layak Anak	Jumlah informasi Layak Anak melalui media above the line dan through the line	Informasi	10	10	10	10	10	10	0	DPK
	2.12.04.2.03.0005	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyebaran informasi layak Anak	Jumlah informasi Layak Anak melalui media above the line dan through the line	Media	7	7	7	7	7	7	902.085.000	Dindikcapil
	2.16.03.2.02.009	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Penyebaran informasi layak Anak	Jumlah sosialisasi informasi layak Anak melalui media below the line	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	16.000.000	Diskominfo
	2.21.02.2.01.0004	PROGRAM PENYELENGGARAAN	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyebaran informasi layak Anak	Jumlah sosialisasi informasi layak Anak	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	324.000.000	Diskominfo

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
		PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		melalui media below the line									
	2.08.06.2.01.00 01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak Anak atas ILA	Kemantren	14	14	14	14	14	14	22.800.000	DP3AP2KB
	2.23.02.2.01.00 02	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	PISA	1	1	1	1	1	1	33.120.000	DPK
	2.23.02.0.01.00 01	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah layanan anak berbasis TIK yang dikembangkan	Layanan	2	2	2	2	2	2	234.000.000	DPK
	1.01.02.2.01.00 36	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	PISA	1	1	1	1	1	1	164.140.000	Dindikpora
	2.23.02.0.01.00 07	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kab/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (kabupaten/ kota memiliki layanan perpustakaan Anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling)	Perpustakaan	2	2	2	2	2	2	339.240.000	DPK
	2.23.02.0.01.00 08	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengembangan Bahan Pustaka	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah bahan pustaka anak yang diadakan	Judul	200	200	200	200	200	200	97.500.000	DPK
	2.23.02.2.02.00 01	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Khusus dan Masyarakat	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	77.740.000	DPK
	1.01.02.2.02.00 38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	68.920.000	Dindikpora
	2.23.02.2.01.00 02	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh Anak	%	70	75	75	75	75	75	0	DPK
	2.23.02.2.02.00 03	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budya Gemar Membaca	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca	orang	10	10	10	10	10	10	243.415.000	DPK
	2.23.02.2.02.00 04	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	131.950.000	DPK
	2.23.02.2.01.00 01	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah pojok baca digital area publik di kabupaten/ kota/ kecamatan/ desa/ kelurahan	Pojok baca digital	2	1	1	1	1	1	0	DPK

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
	-	-	-	-	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah pojok baca digital area publik di kota	Jumlah Pojok baca digital	2	2	2	2	2	2	0	Dindikpora
<b>6</b>	<b>Pelebagaan Partisipasi Anak</b>														
	2.08.06.2.01.00 01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan penguatan kapasitas forum anak	Jumlah Forum Anak yang aktif	Forum Anak	46	46	46	46	46	46	121.750.000	DP3AP2KB
	2.08.06.2.01.00 01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan bagi forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah kegiatan anggota forum Anak sebagai 2P	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	69.776.000	DP3AP2KB
	2.08.06.2.01.00 01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak	Jumlah kegiatan menerapkan PAPP	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	75.600.000	DP3AP2KB
	5.01.02.2.01.00 05	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak	Jumlah kegiatan menerapkan PAPP	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	132.100.000	Bappeda
	2.08.06.2.01.00 01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas fasilitator forum Anak	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	30.000.000	DP3AP2KB
	2.08.06.2.01.00 01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi penguatan peran forum Anak sebagai 2P	Jumlah anak yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional	Orang	5	2	2	2	2	2	110.000.000	DP3AP2KB
<b>III</b>	<b>KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b>														
<b>7</b>	<b>Pencegahan Perkawinan Anak</b>														
	2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase Anak yang mendapat layanan assessment dispensasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	DP3AP2KB

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
			Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	/program/ kegiatan pencegahan KTA		menikah sebelum 18 tahun									
-	-	-	-	-	Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah Anak yang menikah sebelum berusia 18 tahun	Orang	40	-	-	-	-	-	0	Pengadilan Agama Yogyakarta
2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah kegiatan pencegahan perkawinan Anak	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	34.000.000	DP3AP2KB	
-	-	-	-	-	Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah kegiatan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan Anak	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	0	Kemenag
-	-	-	-	-	Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah KUA yang memfasilitasi pencegahan perkawinan Anak	Kemantren/K UA	14	-	-	-	-	-	0	Kemenag
2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah pasangan menerima pembinaan dan/atau bimbingan perkawinan Anak dibawah 19 tahun	Pasang	49	20	20	20	20	20	0	DP3AP2KB	
2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah orang yang menerima bimbingan dan layanan pengasuhan berbasis hak Anak	Orang	3263	2000	2000	2000	2000	2000	112.500.000	DP3AP2KB	
5.1.02.01.01.00 52	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah orang yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia	Orang	14789	10000	10000	1000 0	10000	10000	457.700.000	DP3AP2KB	
-	-	-	-	-	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah KUA yang melakukan bimbingan keluarga bahagia	Kemantren/K UA	14	-	-	-	-	-	0	Kemenag
-	-	-	-	-	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah KUA yang melakukan bimbingan keluarga sakinah	Kemantren/K UA	14	-	-	-	-	-	0	Kemenag
-	-	-	-	-	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah KUA yang melakukan bimbingan BIRAMA	Kemantren/K UA	14	-	-	-	-	-	0	Kemenag
<b>8</b>	<b>Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Keluarga</b>														
2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah kemantren yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat	Kemantren	14	14	14	14	14	14	14	28.050.000	DP3AP2KB

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
			Daerah Kabupaten/Kota	/program/ kegiatan pencegahan KTA		Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)									
	1.06.02.2.03.003	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan Anak	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial	Lembaga	1	2	2	2	2	2	154.300.000	Dinsosnakertrans
	1.06.02.2.03.003	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan Anak	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	45	45	45	45	45	45	4.900.000	Dinsosnakertrans
	1.01.02.2.01.0036	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Jumlah Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan pendidikan yang baik	Jumlah Anak	14069	12073	12073	12073	12073	12073	3.579.000	Dindikpora
	1.02.02.2.02.004	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Persentase balita usia 6-23 bulan mendapatkan MP-ASI pada pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam pencegahan stunting	Orang	88	80	80	80	80	80	1.357.493.245	Dinkes
	1.02.02.2.02.0015	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										141.000.000	
	1.02.01.2.06.0009	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										17.435.000	
	2.14.04.2.01.0019	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun (baduta) pada lokus prioritas yang mendapatkan promosi dan KIE Pengasuhan 1000 hari Pertama Kebidupan (HPK) dalam pencegahan stunting	Keluarga	100	100	100	100	100	100	5.500.000	DP3AP2KB
	2.14.04.2.02.0002	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Jumlah keluarga yang didata dalam pendataan ketahanan keluarga	Keluarga	79000	79000	79000	79000	79000	79000	790.000.000	DP3AP2KB

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
			Kesejahteraan Keluarga												
	2.14.03.2.01.0010	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah orang yang mengakses PPKS	Orang	355	355	355	355	355	355	0	DP3AP2KB
	2.08.07.2.01.0004	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Dasar	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	110,00	-	-	-	-	-	0	Dindikpora
	2.08.07.2.01.0004	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Menengah	Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	46,00	-	-	-	-	-	0	Dindikpora
	2.08.06.2.01.0001	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Media Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	Media	3	3	3	3	3	3	20.250.000	DP3AP2KB
	2.08.07.2.01.0004	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti narkoba	Jumlah Kegiatan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	29.100.000	DP3AP2KB
	8.01.05.2.01.0003	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti narkoba	Jumlah Kelurahan yang diberi penguatan Kelurahan Bersinar	Kelurahan	7	5	5	5	5	5	212.360.000,00	Bakesbangpol
	8.01.05.2.01.0004	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
					Melaksanakan program ketahanan keluarga anti narkoba	Jumlah keluarga yang terfasilitasi program	Keluarga	10	10	10	10	10	10	200.000.000	BNN

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
					Melaksanakan program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya desa/kelurahan di kelurahan yang ditetapkan sebagai kelurahan bersinar (bersih dari narkoba) pada tahun berjalan	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi program	Kelurahan	7	2	2	2	2	2	330.000.000	BNN
<b>9</b>	<b>Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)</b>														
	1.01.02.2.03.0013	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	Persentase satuan PAUD yang menerapkan layanan holistik integratif	%	100	100	100	100	-	-	0	Dindikpora
	1.01.02.2.03.0013	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	Jumlah satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	Jumlah Satuan Pendidikan	100	40	40	40	40	40	0	Dindikpora
	1.01.02.2.03.0016	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya	Terselenggaranya Pelatihan bagi Pendidik PAUD	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	0	Dindikpora
<b>10</b>	<b>Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif</b>														
	1.06.02.2.03.0004	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	15	15	15	15	15	15	1.492.035.500	Dinsosnakertrans
	2.08.06.2.01.0001	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga	2	3	3	3	3	3	0	DP3AP2KB
	2.08.06.2.01.0001	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Pelaksanaan standarisasi	Jumlah daycare ramah Anak	Lembaga	-	1	1	1	1	1	0	DP3AP2KB

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
			Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	daycare ramah Anak										
	2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak	Jumlah Pesantren ramah Anak	Lembaga	8	1	1	1	1	1	11.375.000	DP3AP2KB
	2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih	Jumlah Pesantren yang dilatih pengasuhan anak berbasis hak anak	Lembaga	8	10	11	12	13	14	13.425.000	DP3AP2KB
<b>11</b>	<b>Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik</b>														
	2.11.04.2.01.00 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)/ Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah pembangunan RTHP/RBRA	RTHP/RBRA	7	4	2	2	2	2	5.516.389.000	DLH
	2.11.04.2.01.00 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah perencanaan pembangunan RTHP/RBRA	RTHP/RBRA	9	2	2	2	2	2	867.500.000	DLH
	2.010.05.2.01.0 002	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Pengadaan tanah untuk pembangunan RTHP/RBRA	Lokasi	2	1	1	1	1	1	Tentatif (sesuai kebutuhan)	Dispartaru
	2.11.04.2.01.00 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Standarisasi RBRA	Jumlah RTHP/RBRA yang distandarisasi	RTHP/RBRA		6	4	4	4	4	995.000.000	DLH
	2.22.01.2.10.00 01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Standarisasi RBRA	Jumlah RTHP/RBRA yang terstandar	RTHP/RBRA	1	1	1	1	1	1	0	Disbud
	2.16.03.2.01.00 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Fasilitasi sarana dan prasarana pada RTHP/RBRA	Jumlah WiFi Publik yang tersedia	Titik	1.064	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	0	Diskominfosan
	2.16.03.2.01.00 03	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Fasilitasi sarana dan prasarana	Jumlah CCTV yang tersedia	Titik	5	7	8	9	10	11	50.000.000	Diskominfosan



No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
		APLIKASI INFORMATIKA	Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		pada RTHP/RBRA										
	-	-	-	-	Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah layanan bis sekolah yang dipergunakan untuk antar jemput edukasi di taman lalu lintas	Unit	-	1	1	1	1	1	0	Dishub
	2.15.02.2.02.0002	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Luas ZoSS yang terbentuk	m2	479	300	300	300	300	300	247.500.000	Dishub
					Fasilitasi bangunan ramah anak	Jumlah pembangunan gedung pemerintahan yang memperhatikan aspek ramah anak	Gedung	1	1	1	1	1	1	0	DPUPKP
	-	-	-	-	Fasilitasi bangunan ramah anak	Jumlah ruang ramah anak di fasilitas publik	Ruang	2	-	-	-	-	-	0	Kejaksanaan
	1.03.09.2.01.0008	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Peningkatan kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang ramah anak	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	%	94,58	95,38	95,78	-	-	-	12.764.385.750	DPUPKP
	2.15.02.2.02.0002	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Fasilitasi sarana lalu lintas untuk anak sekolah dan disabilitas	jumlah pelican crossing yang dibangun	unit	-	1	PM	PM	PM	PM	195.000.000	Dishub
	2.15.02.2.09.0003	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan Atau Barang Antar Kota Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan Atau Barang Antar Kota Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi sarana lalu lintas untuk anak sekolah dan disabilitas	Jumlah halte yang dibangun	unit	2	1	PM	PM	PM	PM	30.000.000	Dishub
<b>IV</b>	<b>KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>														
<b>12</b>	<b>Persalinan di Fasilitas Kesehatan</b>														
	1.02.02.2.02.0002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	10.000.000	Dinkes
	1.02.02.2.02.0020	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										120.000.000	
	1.02.02.2.02.0046	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak										520.900.000	

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	1.02.02.2.02.0003	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase kunjungan neonatal	%	99,38	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	258.600.000	Dinkes
	1.02.02.2.02.0001	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Skrining deteksi dini pra-persalinan	Cakupan ibu hamil diskriming HIV dan sifilis	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0001	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Skrining deteksi dini pra-persalinan	Cakupan ibu hamil diskriming hepatitis B	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	Dinkes
<b>13</b>	<b>Status Gizi Balita</b>														
	1.02.02.2.02.0004	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Suplementasi vitamin A pada balita	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A	%	99,97	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.357.493.245	Dinkes
	1.02.02.2.02.0015	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										141.000.000	
	1.02.02.2.02.0004	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	81,68	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	1.357.493.245	Dinkes
	1.02.02.2.02.0015	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										141.000.000	

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
	2.08.06.2.01.00 01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam gizi	Jumlah anggota Forum Anak terlatih 2P gizi	Orang	70	90	90	90	90	90	301.500.000	DP3AP2KB
<b>14</b>	<b>Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun</b>														
	1.02.02.2.02.00 04	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	76,69	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	1.357.493.245	Dinkes
	1.02.02.2.02.00 15	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										141.000.000	
	1.02.02.2.02.00 04	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Fasilitasi peningkatan ASI eksklusif	Jumlah puskesmas yang memiliki konselor ASI	Puskesmas	18	18	18	18	18	18	1.357.493.245	Dinkes
	1.02.02.2.02.00 15	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										141.000.000	
	1.02.02.2.02.00 15	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										141.000.000	
	5.1.02.01.01.00 52	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Fasilitasi peningkatan ASI eksklusif	Jumlah kemitren yang difasilitasi dalam penanganan stunting	Kemitren	14	14	14	14	14	14	91.540.000	DP3AP2KB

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
			Kesejahteraan Keluarga												
<b>15</b>	<b>Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak</b>														
	1.02.02.2.01.0006	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	172.980.000	Dinkes
	1.02.02.2.01.0014	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan										4.652.035.620	
	1.02.02.2.04.0003	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan	Persentase rumah sakit terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	568.425.000	Dinkes
	-	-	-	-	Pelayanan kesehatan bayi/anak dari ibu terinfeksi HIV dan sifilis	Jumlah Layanan Mampu Profilaksis	Jumlah layanan	8	8	8	8	8	8	0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0025	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan kesehatan Penyakit menular dan Tidak menular	Puskesmas dengan proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru ≤5%Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru ≤5%	%	-	-	-	-	-	-	0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0025	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan kesehatan Penyakit menular dan Tidak menular	Pelayanan deteksi dini anak dengan pneumonia	Persentase Puskesmas yang melakukan tata laksana standar pneumonia	%	100,00	-	-	-	-	-	0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0046	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	%	100,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	520.900.000	Dinkes
	1.02.02.2.02.0005	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000.000	Dinkes

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
		KESEHATAN MASYARAKAT													
	1.02.01.2.06.0009	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										5.225.000	
	1.02.02.2.02.0018	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan										173.900.000	
	2.08.07.2.01.0004	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Fasilitasi pelayanan ramah anak di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan ramah anak	Puskesmas	18	18	18	18	18	18	10.010.000	DP3AP2KB
					Fasilitasi pelayanan ramah anak	Fasilitasi Klinik Kesehatan untuk ABH	Layanan	1	1	1	1	1	1	0	Pengadilan Negeri
	-	-	-	-	Pelayanan ramah anak di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan ramah anak di Puskesmas	Puskesmas	18	18	18	18	18	18	0	Dinkes
	5.04.02.2.01.0003	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Aparatur	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang Dan Urusan Pemerintahan Umum	Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan dan penguatan PUSRA	Jumah pelatihan Konvensi Hak Anak dan penguatan Pusra bagi Tenaga Kesehatan (Puskesmas) Kota Yogyakarta	Kegiatan	1	1	-	1	-	1	105.000.000	BKPSDM
<b>16</b>	<b>Lingkungan Sehat</b>														
	1.02.02.2.02.0017	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Desa/Kelurahan dengan STBM (Sanitasi Totak Berbasis Masyarakat)	%	86,20	-	-	-	-	-	0	Dinkes
	-	-	-	-	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah sosialisasi air bersih di Kemantren	Kemantren	3	6	-	-	-	-	0	PDAM

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
	1.02.02.2.02.0017	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Desa/Kelurahan dengan STBM	Kelurahan	45	45	45	45	45	45	0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0029	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat dalam rangka Swasti Saba Kota Sehat	Kabupaten/Kota Sehat	Kemantren	14	14	14	14	14	14	380.975.000	Dinkes
	1.02.02.2.02.0017	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	91,7%						0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0017	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%	92,6%						0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0017	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pemicuan pendekatan perubahan perilaku terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Stunting	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pemicuan STBM Stunting	Kelurahan	45	45	45	45	45	45	0	Dinkes
	2.14.04.2.02.0002	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Promosi Kesehatan	Persentase posyandu aktif	%	623	623	623	623	623	623	0	DP3AP2KB
	-	-	-	-	Peningkatan kontribusi pemenuhan	Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan layanan	Sambungan rumah	22766	-	-	-	-	-	0	PDAM

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
					akses air minum jaringan perpipaan	SPAM berbasis masyarakat									
	-	-	-	-	Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah produksi SPAM PDAM Tirtamarta	Liter/detik	510	-	-	-	-	-	0	PDAM
	-	-	-	-	Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Proyeksi kebutuhan air baku Kota Yogyakarta	Liter/detik	-	712	-	-	-	-	0	PDAM
	-	-	-	-	Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah pemanfaatan air baku dari SPAM Regional Kartamantul (PDAB)	Liter/detik	75	271	-	-	-	-	0	PDAM
	1.03.05.2.01.0025	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	KK	19831	20676	20976				17.014.400.000	DPUPKP
	2.08.06.2.01.0001	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi bagi SDM forum anak sebagai 2P sanitasi	Jumlah anggota Forum Anak yang mendapat sosialisasi 2P sanitasi	Orang	70	90	90	90	90	90	301.500.000	DP3AP2KB
	1.02.02.2.02.0018	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Sosialisasi bagi SDM forum anak sebagai 2P sanitasi	Jumlah anggota Saka Bakti Husada di Krida Kesehatan Lingkungan	orang	10	10	10	10	10	10	57.750.000	Dinkes
	2.08.02.2.03.0002	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SumberDaya Lembaga Penyedia LayananPemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi//kesehatan lingkungan	Jumlah kegiatan yang mendapat sosialisasi 2P sanitasi/kesehatan lingkungan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	28.750.000	DP3AP2KB
<b>17</b>	<b>Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok</b>														
	1.02.02.2.02.0025	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Presentase Kantor Kelurahan yang menerapkan kebijakan KTR	Kelurahan	100	100	100	100	100	100	218.000.000	Dinkes

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
	2.08.06.2.01.001	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi bahaya rokok bagi anak sebagai 2P	Jumlah anggota Forum Anak mendapat sosialisasi 2P Hebat Tanpa Rokok	Orang	70	90	90	90	90	90	301.500.000	DP3AP2KB
<b>V</b>	<b>KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA</b>														
<b>18</b>	<b>Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun</b>														
	1.01.02.2.01.0036	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.579.000	Dindikpora
	1.01.02.2.01.0036	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka partisipasi kasar SD/MI/SD LB/ sederajat	%	105,22	105,26	105,28	105,30	105,32	105,34	3.579.000	Dindikpora
	1.01.02.2.01.0036	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/SMP LB/ sederajat	%	112,39	112,43	112,45	112,47	112,49	112,51	3.759.000	Dindikpora
	1.01.02.2.02.0032	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta percepatan wajib belajar 12 (dua belas) tahun	Jumlah sekolah dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)	Satuan pendidikan	16	16	16	16	16	16	18.707.650.000	Dindikpora
	1.01.02.2.01.0021	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah	Jumlah siswa yang memperoleh bantuan JPD jenjang SD/MI	Orang	7760	5554	5554	5554	5554	5554	3.660.000.000	Dindikpora
	1.01.02.2.01.0032	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah	Jumlah siswa yang memperoleh bantuan JPD jenjang SMP/MTs	Orang	4764	6237	6237	6237	6237	6237	3.400.000.000	Dindikpora



No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
	1.01.02.2.01.00 32	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah	Jumlah siswa yang memperoleh bantuan JPD jenjang SMA/MA/SMK	Orang	4376	-	-	-	-	-	3.490.000.000	Dindikpora
	1.01.02.2.03.00 11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan anak Usia Dini	Penyediaan Biaya personil Peserta Didik PAUD	Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah	Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima JPD	orang	2001	2025	2025	2025	2025	2025	1.026.600.000	Dindikpora
	1.01.02.2.01.00 36	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah	Jumlah Kecamatan dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%	Kemantren	-	-	-	-	-	-	0	Dindikpora
	1.01.02.2.01.00 36	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah	Jumlah Kecamatan dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%	Kemantren	-	-	-	-	-	-	0	Dindikpora
	1.01.02.2.01.00 36	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah	Jumlah Kecamatan dengan APK SMP/MTs/SMPLE sekurang-kurangnya 100%	Kemantren	-	-	-	-	-	-	0	Dindikpora
<b>19</b>	<b>Sekolah Ramah Anak (SRA)</b>														
	2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di Setiap jenjang pendidikan	Persentase TK Negeri dan Swasta yang ramah anak	%	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	16.750.000	DP3AP2KB

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
			Daerah Kabupaten/Kota												
	2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di Setiap jenjang pendidikan	Persentase SD Negeri dan Swasta yang ramah anak	%	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98	1,00	10.750.000	DP3AP2KB
	2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di Setiap jenjang pendidikan	Persentase SMP Negeri dan Swasta yang ramah anak	%	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98	1,00	10.750.000	DP3AP2KB
	2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di Setiap jenjang pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	Satuan pendidikan	50	50	50	50	50	50	10.750.000	DP3AP2KB
	2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di Setiap jenjang pendidikan	Jumlah sekolah yang didampingi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	Sekolah	5	5	5	5	5	5	29.500.000	DP3AP2KB
	2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di Setiap jenjang pendidikan	Penggiat SRA (fasilitator SRA)	Orang	14	14	14	14	7	7	5.750.000	DP3AP2KB
	2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di Setiap jenjang pendidikan	Jumlah Lembaga yang didampingi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Lembaga	15	15	15	15	15	15	55.000.000	DP3AP2KB
	1.01.02.2.02.00 38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di Setiap jenjang pendidikan	Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (festival kreativitas anak)	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	300.000.000	Dindikpora
	2.15.02.2.08.00 04	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di Setiap jenjang pendidikan	Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (festival kreativitas anak)	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	26.125.000	Dishub
	2.15.02.2.08.00 04	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di Setiap jenjang pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan/atau edukasi keselamatan lalu lintas di sekolah	Kegiatan	-	3	3	3	3	3	91.250.000	Dishub

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
				Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota											
	1.05.04.2.04.0001	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan edukasi Masyarakat	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di Setiap jenjang pendidikan	Jumlah sekolah tereduksi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK yang dilayani	TK/PAUD/KB	20	36	36	36	36	36	170.550.000	Damkarmat
	2.14.02.2.01.0009	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Nonformal dan Informal	Fasilitasi Pendidikan Karakter	Jumlah kegiatan pembangunan karakter di satuan pendidikan	Sekolah	14	12	10	10	10	10	104.500.000	DP3AP2KB
	2.08.07.2.01.0004	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Fasilitasi Pendidikan Karakter	Jumlah Kegiatan yang di fasilitasi dalam pendidikan karakter	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	23.500.000	DP3AP2KB
	1.01.02.2.02.0038	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peningkatan karakter peserta didik	Jumlah kegiatan pembangunan karakter di satuan pendidikan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	50.000.000	Dindikpora
	2.15.02.2.08.0004	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pendidikan Karakter	Jumlah kegiatan sosialisasi dan/atau edukasi keselamatan lalu lintas di taman keselamatan lalu lintas	Kegiatan	-	44	44	44	44	44	1.144.301.000	Dishub
	-	-	-	-	Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di sekolah	Jumlah sekolah dengan PJAS yang aman	Sekolah	54	-	-	-	-	-	0	Dinkes
	1.02.03.2.02.0003	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Advokasi Satuan Pendidikan	Pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan	Fasilitasi pendidikan pencegahan Napza pada lembaga pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan Napza	Satuan Pendidikan	4	4	4	4	4	4	94.500.000	Dinkes
	8.01.05.2.01.0003	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penguatan Kader Anti Napza disekolah	jumlah sekolah yang diberi penguatan kader anti napsa	Jumlah sekolah	10	5	5	5	5	5	168.200.000,00	Bakesbangpol
					Membentuk remaja teman sebaya anti	Remaja teman sebaya anti narkotika yang terbentuk	Orang	10	-	-	-	-	-	0	BNN

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
					narkotika di lingkungan sekolah										
					Membentuk pendidik sebaya anti narkotika di lingkungan sekolah	Pendidik sebaya anti narkotika yang terbentuk	Orang	-	10	10	10	10	10	210.125.000	BNN
					Melaksanakan informasi edukasi melalui talkshow kepada siswa-siswi di sekolah	Jumlah siswa yang mendapat informasi dan edukasi	Orang	0	30	30	30	30	30	38.550.000	BNN
					Melaksanakan informasi edukasi melalui podcast	Jumlah kegiatan podcast	Kegiatan	0	5	5	5	5	5	19.500.000	BNN
					Melaksanakan pemberdayaan masyarakat anti narkoba di lingkungan masyarakat dan pendidikan dengan membentuk penggiat P4GN, melaksanakan tes urine, dsb.	Jumlah lembaga yang diberdayakan	Lembaga	2	-	-	-	-	-	0	BNN
	2.11.08.2.01.00 05	PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga pendidikan, formal/lembaga masyarakat/Komunitas/ Kelompok Masyarakat	Bimtek, Workshop, Pelatihan, Pendampingan dan pemberian penghargaan terhadap sekolah yang melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Jumah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (Sekolah BWL/Sekolah Rintisana Adiwiyata, Sekolah adiwiyata kota, provinsi, nasional dan mandiri)	Sekolah		136	146	-	-	-	498.220.000	DLH
	1.06.06.2.02.00 02	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kegiatan Pekerja Sosial Goes to School untuk anak	Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan Tagana masuk sekolah	Sekolah	6	14	14	14	14	14	304.218.750	Dinsosnakertrans
	1.05.04.2.04.00 01	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan edukasi Masyarakat	Kegiatan Perlindungan Anak Goes to School untuk anak	Pengenalan dini Profesi Damkar	Sekolah	-	14	14	14	14	14	0	Damkarmat
	1.05.02.2.01.00 06	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Perlindungan Anak Goes to School untuk anak	Penumbuhan Gerakan Pantib For School	Sekolah	10	20	25	30	35	40	114.000.000	Satpol PP

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
	-	-	-	-	Kegiatan Perlindungan Anak Goes to School untuk anak	Jumlah pelaksanaan Jaksa Masuk Sekolah (JMS)	Kegiatan	27	-	-	-	-	-	0	Kejaksanaan
	1.05.03.2.02.0016	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana	Jumlah Kawasan yang menerapkan SPAB	Kawasan	8 (Sekolah)	10 (Sekolah)	10	-	-	-	1.140.909.000	BPBD
<b>20</b>	<b>Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak</b>														
	2.14.04.2.02.0004	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Fasilitasi pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan ketrampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif	Orang	40	80	80	80	80	80	23.800.000	DP3AP2KB
	2.08.06.2.01.0001	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan budaya	Jumlah Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kemantren	14	14	14	14	14	14	0	DP3AP2KB
	2.22.08.5.07.0001	PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Fasilitasi pemuda kader berupa Instruktur Kampung Menari	Jumlah kampung yang difasilitasi dalam peningkatan ketrampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif	Kampung	169	169	169	169	169	169	5.685.430.000	Disbud
	2.19.02.2.01.0004	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan budaya	Jumlah pelaksanaan kegiatan Gelar Pelajar dan Pemuda	Kegiatan	5	6	6	6	6	6	1.500.000.000	Dindikpora
	2.22.08.5.07.0006	PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Lomba Lukis DIY Kyoto	Jumlah karya terseleksi yang mengikuti lomba lukis	Karya terseleksi terbaik	20	20	20	20	20	20	131.060.000	Disbud
	2.22.08.5.07.0009	PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Fasilitasi Dalang Pelatihan Anak dan Remaja	Jumlah anak yang mengikuti pelatihan	Orang	20	20	20	20	20	20	0	Disbud

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
		YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN													
	2.22.08.5.07.0009	PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Festival Dalang Anak	Promosi pelaksanaan kegiatan kreativitas budaya melalui Kompetisi Dalang Anak	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	518.050.000	Disbud
	3.26.03.2.01.0006	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan budaya	Fasilitasi Pemilihan Dimas Diajeng	Kegiatan	1	1		1		1	1.462.295.250	Dinpar
	3.26.05.2.01.0008	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan budaya	Fasilitasi Pemilihan Duta Kampung Wisata	Kegiatan			1		1		368.710.000	Dinpar
	3.26.05.2.01.0009	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan budaya	Fasilitasi Pentas Kangen Jogja	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1.261.875.000	Dinpar
	3.26.02.2.03.0003	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan budaya	Kegiatan Tour De Kotabaru	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1.275.080.000	Dinpar
	3.26.05.2.01.0005	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan budaya	Kegiatan Jogja Kreatif Kotabaru Ceria	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	4.388.220.000	Dinpar
	3.26.03.2.01.0006	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan budaya	Festival Wayang Jogja Night Carnival (WJNC)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	6.318.853.950	Dinpar
	2.08.06.2.01.0001	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan budaya	Jumlah Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kemantren	14	14	14	14	14	14	0	DP3AP2KB

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
	2.22.08.5.01.00 02	PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan budaya	Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya melalui Kompetisi Bahasa dan Sastra	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	2.225.482.500	Disbud
	2.22.08.5.01.00 01	PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Lomba Cerdas Cermat Sejarah	Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya melalui Kompetisi Lomba Cerdas Cermat Sejarah	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	523.995.000	Disbud
	2.22.08.5.01.00 03	PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan (Permuseuman)	Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya melalui Kompetisi Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan (Permuseuman)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	510.715.000	Disbud
	2.22.08.5.01.00 03	PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Pengenalan museum kepada generasi muda (Wajib Kunjung Museum)	Pengenalan Museum untuk generasi muda	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	416.790.000	Disbud
	1.05.02.2.01.00 06	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan budaya	Jumlah satuan pendidikan yang menampilkan kreativitas anak dan kegiatan budaya dalam Penanganan Pantib For School	Sekolah	15	5	5	5	5	5	96.625.000	Satpol PP
	2.08.06.2.01.00 01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kesehatan reproduksi di kalangan pemuda melalui pendidikan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga	Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga	Orang	1	1	1	1	1	1	19.450.000	DP3AP2KB
	7.01.03.2.06.00 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kegiatan kreativitas dan budaya	Ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk anak	Kegiatan	2	1	-	-	-	-	12.350.000	Kemantren Mantrijeron
	7.01.03.2.06.00 12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kegiatan kreativitas dan budaya	Ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk anak	Kegiatan	2	4	-	-	-	-	30.030.000	Kemantren Mantrijeron
	7.01.03.2.06.00 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kegiatan kreativitas dan budaya	Ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk anak	Kegiatan	2	2	-	-	-	-	10.035.500	Kemantren Kraton

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
	7.01.03.2.01.00 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
	7.01.03.2.06.00 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kegiatan kreativitas dan budaya	Ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk anak	Kegiatan	4	8	-	-	-	-	67.314.000	Kemantren Mergangsan
	7.01.03.2.06.00 12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas											
	7.01.03.2.01.00 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
	7.01.03.2.01.00 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan kreativitas dan budaya	Ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk anak	Kegiatan	-	3	-	-	-	-	4.250.000	Kemantren Umbulharjo
	7.01.03.2.06.00 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kegiatan kreativitas dan budaya	Ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk anak	Kegiatan	-	1	-	-	-	-	0	Kemantren Kotagede
	7.01.03.2.01.00 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan kreativitas dan budaya	Ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk anak	Kegiatan	1	4	-	-	-	-	4.955.000	Kemantren Gondokusuman
	7.01.03.2.06.00 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kegiatan kreativitas dan budaya	Ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk anak	Kegiatan	1	2	-	-	-	-	9.350.000	Kemantren Danurejan
	7.01.03.2.06.00 12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kegiatan kreativitas dan budaya	Ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk anak	Kegiatan	2	2	-	-	-	-	9.416.000	Kemantren Danurejan
	7.01.03.2.06.00 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk	Kegiatan kreativitas dan budaya	Ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk anak	Kegiatan	2	1	-	-	-	-	5.017.000	Kemantren Pakualaman





No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
				Menuju Keluarga Berkualitas											
	2.23.02.2.02.00 01	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Khusus dan Masyarakat	Kegiatan kreativitas dan budaya	Jumlah kegiatan kreativitas dan budaya	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	0	DPK
	2.23.02.2.01.00 01	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kegiatan kreativitas dan budaya	Jumlah pojok baca digital yang terbangun dan terselenggara di daerah	Lembaga	1	1	1	1	1	1	0	DPK
	2.08.06.2.01.00 01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi masjid ramah anak	Jumlah masjid terfasilitasi ramah anak	Lokasi	1	1	1	1	1	1	13.950.000	DP3AP2KB
<b>VI</b>	<b>KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS</b>														
<b>21.a</b>	<b>Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Anak</b>														
	2.08.03.2.01.00 01	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Fasilitasi pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan dan eksploitasi	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	-	0,92 - 1,9	0,82 - 1,8	-	-	-	120.559.900	DP3AP2KB
	2.08.03.2.01.00 01	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Jumlah Kemantren yang diadvokasi tentang perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Kemantren	14	14	14	14	14	14	120.559.900	DP3AP2KB
	2.16.03.2.02.00 09	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Jumlah Sekolah terlatih internet aman untuk anak	Sekolah	1	1	1	1	1	1	16.000.000	Diskominfo
	2.08.03.2.03.00 02	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Jumlah Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA)	Kelurahan	2	2	2	2	2	2	6.870.000	DP3AP2KB
	2.08.07.2.02.00 06	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Persentase penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi yang terlayani	%	40	40	40	40	40	40	0	DP3AP2KB
	2.08.07.2.02.00 06	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Inovasi layanan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Layanan	2	2	2	2	2	2	0	DP3AP2KB

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
			Daerah Kabupaten/Kota												
	1.06.04.2.01	REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penegmis di Luar Panti Sosial	-	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Jumlah SDM yang memadai untuk layanan anak korban kekerasan dan penelantaran	Orang	-	60	60	60	60	60	82.800.000	Dinsosnakertrans
	1.06.04.2.02	REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (MKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	-											
	2.08.07.2.02.00 06	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Jumlah fasilitas sarana prasarana penunjang penanganan kekerasan yang memadai untuk layanan anak korban kekerasan dan penelantaran	Unit	4	4	4	4	4	4	0	DP3AP2KB (UPT PPA)
	2.08.07.2.02.00 06	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Jumlah layanan yang sesuai dengan standar	Layanan	6	6	6	6	6	6	0	DP3AP2KB (UPT PPA)
	2.08.06.2.01.00 01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan bagi forum anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah pelatihan forum anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan terhadap anak	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	69.776.000	DP3AP2KB
	2.08.06.2.01.00 01	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan bagi forum anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Pelibatan forum anak dalam penyusunan profil KLA	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	0	DP3AP2KB
	2.08.07.2.03.00 06	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan anak korban kekerasan	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengada layanan anak korban kekerasan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	77.500.000	DP3AP2KB

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
			Khusus Tingkat Daerah												
	2.08.03.2.03.00 02	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan anak korban kekerasan	Jumlah sumber daya manusia unit layanan telah dilatih manajemen kasus	pelatihan	2	2	2	2	2	2	122.914.500	DP3AP2KB
	2.08.03.2.01.00 01	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah Kemantren yang tersosialisasikan pembebasan anak dari eksploitasi	Kemantren	14	14	14	14	14	14		DP3AP2KB
	2.08.03.2.03.00 02	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah Kelurahan yang mencanangkan destinasi wisata yang ramah anak bebas eksploitasi	Kelurahan	2	2	2	2	2	2	0	DP3AP2KB
	2.08.03.2.03.00 02	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Media	2	2	2	2	2	2	1.500.000	DP3AP2KB
	2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Jenis/Media	2	2	2	2	2	2	40.700.000	DP3AP2KB
	2.14.02.2.01.00 09	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Nonformal dan Informal	Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Media	1	1	1	1	1	1	18.000.000	DP3AP2KB
	2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Media	1	-	-	-	-	-	500.000	DP3AP2KB
<b>22.a</b>	<b>Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS</b>														
	-	-	-	-	Fasilitasi pelayanan bagi anak korban	Puskesmas yang menangani atau memberi layanan penyalahgunaan NAPZA	Puskesmas	5	5	5	5	5	5	0	Dinkes



No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
		SOSIAL, DAN BUDAYA	Ekonomi, Sosial dan Budaya												
<b>22.b</b>	<b>Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik</b>														
	1.05.03.2.02.00 06	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Fasilitas Sarana Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah rambu Petunjuk Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul	Unit	400	-	-	-	-	-	199.500.000	BPBD
	1.06.06.2.01.00 01	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Makanan	Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah fasilitas penyediaan makanan bagi korban bencana	Orang	73	-	-	-	-	-	1.132.925.000	Dinsosnakertrans
	1.05.03.2.02.00 06	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Fasilitasi Kampung tangguh bencana	Jumlah Kampung tangguh bencana yang dikembangkan	Kampung	13	15	-	-	-	-	3.504.186.000	BPBD
	1.06.06.2.02.00 02	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Perlindungan sosial bencana alam bagi anak	Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapatkan edukasi TAGANA masuk sekolah	Sekolah	6	14	14	14	14	14	304.218.750	Dinsosnakertrans
	1.05.03.2.03.00 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penanganan anak korban bencana dan konflik	Persentase korban bencana alam yang mendapatkan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi	%	100,00	100,00	-	-	-	-	3.815.316.000	BPBD
	1.05.03.2.03.00 09	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penanganan anak korban bencana dan konflik	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan layanan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi	Orang	105	100	-	-	-	-	459.873.250	BPBD
	1.06.06.2.01.00 05	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	Pelayanan Dukungan Psikososial	Penanganan anak korban bencana dan konflik	Jumlah anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	Orang	18	-	-	-	-	-	3.575.000	Dinsosnakertrans
	2.08.07.2.01.00 05	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kab/Kota	Penanganan anak korban bencana dan konflik	Jumlah anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	Kegiatan	1	1	-	-	-	-	3.350.000	DP3AP2KB
	1.05.04.2.04.00 01	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan edukasi Masyarakat	Fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat	Jumlah satuan pendidikan yang mendapat kunjungan Damkarmat Goes to School	Kegiatan	14	14	14	14	14	14	0	Damkarmat
	1.05.03.2.02.00 06	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko bencana serta rekomendasi strategi	Dokumen	-	-	-	1	-	-	200.000.000	BPBD
	2.11.08.2.01.00 05	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga pendidikan,	Peningkatan ketahanan iklim	Jumlah Kampung berketahanan iklim	Kampung	105	110	115	-	-	-	34.500.000	DLH

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
		HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	formal/lembaga masyarakat/ Komunitas/ Kelompok Masyarakat											
<b>23.a</b>	<b>Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi</b>														
	1.06.04.2.01.0008	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Jumlah Kemantren yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas	Kemantren	-	14	14	14	14	14	1.312.309.000	Dinsosnakertrans
	1.06.02.2.03.0003	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Disabilitas	Lembaga	-	2	2	2	2	2	6.900.000	Dinsosnakertrans
	-	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Inklusi (SPPI)	SPPI	112	136	138	140	142	144	0	Dindikpora
	1.06.02.2.03.0004	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas, dan terisolasi	Forum	-	14	14	14	14	14	1.312.309.000	Dinsosnakertrans
	1.01.02.2.01.0050	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus, terutama bagi anak penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi	Media	2	3	3	3	3	3	32.803.750	Dindikpora
	2.08.07.2.01.0005	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kab/ Kota	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus, terutama bagi anak penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi	Media	1	1	1	1	1	1	3.200.000	DP3AP2KB
	1.01.02.2.01.0027	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas,	Jumlah pelatihan penanganan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	369.550.000	Dindikpora

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab	
									2025	2026	2027	2028	2029			
				Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	kelompok minoritas, dan terisolasi											
	1.01.02.2.01.0049	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Pendidikan	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Jumlah pelatihan penanganan perlindungan anak berebutuhan khusus	Kegiatan	15	15	15	15	15	15	883.040.000	Dindikpora	
	2.08.07.2.01.0005	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kab/Kota	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Jumlah pelatihan penanganan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	11.080.000	DP3AP2KB	
	1.06.04.2.02.0007	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Jumlah Kecamatan (Kemantren) yang difasilitasi untuk pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus	Kemantren	14	14	14	14	14	14	1.115.549.000	Dinsosnakertrans	
	1.06.02.2.03.0004	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Jumlah layanan disabilitas	Layanan	1	1	1	1	1	1	64.125.000	Dinsosnakertrans	
	1.01.02.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Jumlah Lembaga layanan disabilitas	Lembaga	1	1	1	1	1	1	0	Dindikpora	
<b>23.b</b>	<b>Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)</b>															
	2.08.07.2.01.0004	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Fasilitasi perlindungan anak PSM	Jumlah Kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan perlindungan anak dengan PSM	Kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	16.750.000	DP3AP2KB
	2.08.07.2.01.0004	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Fasilitasi perlindungan anak PSM	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak kelompok minoritas dan anak PSM	Forum	1	1	1	1	1	1	8.525.000	DP3AP2KB	



No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
	2.08.03.2.01.0001	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Fasilitasi perlindungan anak PSM	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak kelompok minoritas dan anak PSM	Forum	1	1	1	1	1	1	0	DP3AP2KB
	2.08.07.2.01.0004	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Fasilitasi perlindungan anak PSM	Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus terutama bagi anak dengan PSM	Media	1	1	1	1	1	1	2.500.000	DP3AP2KB
<b>24.a</b>	<b>Penyelesaian Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)</b>														
	-	-	-	-	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA	100	100	100	100	100	100	0	Kemenkumham
	-	-	-	-	Fasilitasi penanganan ABH	Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversi di tingkat penyidikan	%	4,00	3,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0	Polresta Yogyakarta
	1049.BCA.U03	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Hukum Perseorangan - Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat	Fasilitasi penanganan ABH	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi oleh Hamam	%	60	5	5	5	5	5	0	Pengadilan Negeri
	2.08.07.2.03.0006	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kab/Kota	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan ABH	Kota	1	1	1	1	1	1	16.100.000	DP3AP2KB
	2.08.07.2.01.0005	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kab/Kota	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Peningkatan Aparat Penegak Hukum (APH)	APH	6	6	6	6	6	6	64.500.000	DP3AP2KB
	-	-	-	-	Fasilitasi penanganan ABH	Hakim yang mengikuti Diklat Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Hakim	2						0	Pengadilan Negeri
	-	-	-	-	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah perkara ABH yang berhasil difasilitasi diversi pada tingkat penuntutan	Perkara	1	-	-	-	-	-	0	Kejaksaan
	-	-	-	-	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah pelimpahan perkara ABH kepada Pengadilan Negeri	Perkara	16	-	-	-	-	-	0	Kejaksaan
	-	-	-	-	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah perkara ABH yang diselesaikan melalui persidangan	Perkara	16	-	-	-	-	-	0	Kejaksaan
	-	-	-	-	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah perkara ABH yang telah diselesaikan dengan pelaksanaan putusan pengadilan	Perkara	13	-	-	-	-	-	0	Kejaksaan
	-	-	-	-	Fasilitasi penanganan ABH	Peningkatan Aparat Penegak Hukum (APH)	APH	5	15	20	25	30	35	0	Kemenkumham

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (Tahun 2023)	Target					Alokasi Pendanaan 2025-2029 (Rp)	Instansi Penanggung Jawab
									2025	2026	2027	2028	2029		
	2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan pencegahan agar anak tidak menjadi ABH	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	59.400.000	DP3AP2KB
	-	-	-	-	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi anak	LPKA	80	95	100	100	100	100	0	Kemenkumham
	2.08.07.2.01.00 04	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Fasilitasi bagi ABH	Persentase ABH sebagai korban yang memperoleh layanan hak integrasi	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0	DP3AP2KB
	-	-	-	-	Fasilitasi bagi ABH	Jumlah anak yang mendapat rekomendasi layanan hak integrasi	Anak	4						0	Bapas
	-	-	-	-	Fasilitasi bagi ABH	Pembinaan Fisik, Mental, Disiplin (FMD)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	0	Bapas
	-	-	-	-	Fasilitasi bagi ABH	Persentase ABH sebagai pelaku yang memperoleh layanan hak integrasi	%	95,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	0	Kemenkumham
	-	-	-	-	Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah anak	Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal (pilot project)	Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta	1	5	7	9	11	15	0	Polresta Yogyakarta
<b>24.b</b>	<b>Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya</b>														
	8.01.06.2.01.00 03	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Fasilitasi penanganan anak korban jaringan terorisme	Jumlah kegiatan pencegahan terorisme	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	70.375.000,00	Bakesbangpol